
Peran Reses DPRD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Studi di Lakudo, Buton Tengah

Nurfadillah Hamidin¹ La Ode Mustafa², Wa Ode Srijuna Ramayana³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

Nurfadillah@gmail.com

*Email Korespondensi: Nurfadillah@gmail.com

Abstract:

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of the recess period conducted by members of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Buton Tengah Regency in absorbing public aspirations, focusing on Lakudo Subdistrict. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that although the recess was relatively effective in gathering public aspirations, challenges such as limited time and resources affected the scope of aspiration collection. Public participation also varied, with some groups not fully involved. This study suggests enhancing coordination between DPRD and the community, as well as optimizing the recess period to increase public involvement and the effectiveness of absorbing aspirations. The implications of this research are expected to help improve the recess strategy and strengthen the role of DPRD in policy-making.*

Keywords: *effectiveness, recess, DPRD, public aspirations participation*

Abstrak

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan masa reses oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah dalam menyerap aspirasi masyarakat, dengan fokus pada Kecamatan Lakudo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan reses cukup efektif dalam menjangkau aspirasi masyarakat, beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya mempengaruhi cakupan penyerapan aspirasi. Partisipasi masyarakat juga bervariasi, dengan beberapa kelompok yang belum sepenuhnya terlibat. Penelitian ini menyarankan peningkatan koordinasi antara DPRD dan masyarakat, serta optimalisasi waktu reses untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan efektivitas penyerapan aspirasi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat membantu memperbaiki strategi pelaksanaan reses dan memperkuat peran DPRD dalam pengambilan kebijakan.

Kata Kunci: efektivitas, reses, DPRD, aspirasi masyarakat, partisipasi

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem politik yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan politik. Di Indonesia, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari lembaga legislatif memainkan peran penting dalam memperkuat proses demokrasi di tingkat daerah. DPRD berfungsi sebagai perwakilan rakyat yang bertugas menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat adalah kegiatan reses, di mana anggota DPRD berkewajiban untuk turun langsung ke masyarakat guna menyerap aspirasi, keluhan, dan saran yang terkait dengan isu-isu publik di daerah pemilihan mereka.

Kegiatan reses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), yang menggariskan bahwa reses merupakan kewajiban bagi setiap anggota legislatif untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Melalui kegiatan reses, anggota DPRD diharapkan mampu menampung berbagai masukan dari masyarakat yang selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah. Selain itu, kegiatan reses juga menjadi sarana bagi DPRD untuk memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat atas kinerja mereka selama masa jabatan.

Namun, efektivitas pelaksanaan masa reses DPRD tidak selalu optimal. Berbagai studi menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang sering kali dihadapi dalam pelaksanaan reses, seperti keterbatasan waktu, kurangnya partisipasi masyarakat, serta permasalahan dalam pengalokasian anggaran. Penelitian sebelumnya oleh Nurjihad (2017) dan Dian Novita Zanuri (2020) menyoroti bahwa hasil reses sering kali belum sepenuhnya digunakan secara efektif dalam perumusan kebijakan, serta adanya ketidakselarasan antara aspirasi masyarakat dan implementasi kebijakan di lapangan.

Dalam konteks Kabupaten Buton Tengah, pelaksanaan reses oleh anggota DPRD menjadi sarana yang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kecamatan Lakudo, sebagai salah satu wilayah dalam kabupaten tersebut, menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk kesenjangan sosial, sarana publik yang kurang memadai, serta masalah ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu, peran reses sangat signifikan dalam menggali kebutuhan dan prioritas pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat.

Kegiatan reses DPRD di Kecamatan Lakudo bertujuan untuk mendengarkan keluhan masyarakat dengan maksud menyerap aspirasi dan saran dari masyarakat tentang masalah-masalah dan skala prioritas apa yang dibutuhkan masyarakat Kecamatan Lakudo. Oleh sebab itu, perlu adanya tanggung jawab dan keterbukaan dari pemerintah maupun masyarakat. Semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan pendapat dan aspirasi untuk pembangunan Kecamatan Lakudo yang menyeluruh. Dengan harapan dapat memaksimalkan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan DPRD di Kecamatan Lakudo.

Kebutuhan dalam menyejahterakan masyarakat semakin beragam di Kecamatan Lakudo seperti, kesenjangan sosial, sarana publik, faktor ekonomi, dan pendidikan. Dan hal ini yang mendorong pemerintah khususnya DPRD di Kecamatan Lakudo untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok anggota DPRD, untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat dengan kegiatan Reses.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis mendapatkan data berupa usulan masyarakat dalam masa sidang reses di dapil 1 Kecamatan Lakudo. Usulan tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Usulan masyarakat periode Januari - September 2022

Masa Sidang I	Masa Sidang II	Masa Sidang III
<p>Masa sidang I bulan Okt. – Januari 2021/2022 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penimbunan sarana Olahraga • Pemagaran TPU • Pengadaan mesin pemotong rumput • Pemabangunan ganda pos kamling sekaligus posyandu • Pembangunan aula pertemuan • Pengaspalan jalan tani • Bantuan anggaran untuk Masjid At-Taqwa • Pengaspalan jalan wakainande • Pembuatan rumah adat 	<p>Masa sidang II bulan Februari. – Mei 2022, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan aula kelurahan • Pembukaan jalan baru bolimohangi • Pengadaan rumah adat • Penambahan tinggi talud • Rehabilitasi pagar TPU • Jaring untuk para Nelayan (2 inc) • Pengaspalan jalan usaha tani kaone one • Pengadaan pagar seragam • Pengadaan bangunan postum 	<p>Masa sidang III bulan Juni. – September 2022, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan puskesmas pembantu • Pembuatan kartu nelayan • Pagar seragam pemukiman • Pengadaan cool box • Pembangunan jalan masuk perahu warga • Pembanguna pagar SDN 6 Lakudo • Pengadaan sarana dan prasarana alat tangkap nelayan • Pengadaan modal usaha UMKM • Bedah Rumah

Sumber data. Sekretariat DPRD Buton Tengah

Berdasarkan tabel di atas terdapat berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Lakudo baik itu dari aspek pembangunan infrastruktur maupun dari aspek pemberdayaan masyarakat, berbagai usulan tersebut merupakan kondisi riil yang penulis temui dilapangan. Dari berbagai usulan yang diberikan masyarakat, tidak semua yang di akomodir dan ditindak lanjuti. Ada beberapa usulan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat namun belum mendapat perhatian, hal tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini ;

Tabel 2. Daftar usulan yang tidak terakomodir

Masa Sidang III	Masa Sidang II	Masa Sidang III
<p>Masa sidang I bulan Okt. – Januari 2021/2022 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan mesin pemotong rumput 	<p>Masa sidang II bulan Februari. – Mei 2022, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembangunan aula kelurahan 	<p>Masa sidang III bulan Juni. – September 2022, sebagai berikut :</p>

<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan aula pertemuan • pengaspalan jalan tani • pembuatan rumah adat 	<ul style="list-style-type: none"> • pembukaan jalan baru bolimohangi • penambahan tinggi talud • jaring untuk para nelayan • pengadaan pagar seragam 	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan puskesmas pembantu • pagar seragam pemukiman • pembangunan jalan masuk perahu warga
--	---	---

Sumber data. Sekretariat DPRD Buton Tengah

Melihat data pada table tersebut, terdapat beberapa persoalan yang membuat penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian guna mengetahui seberapa efektif sidang reses yang telah dilakukan oleh anggota DPRD dapil 1 Kecamatan Lakudo periode Januari – September 2022 yang di ketahui belum terakomodir pelaksanaannya.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas hasil reses anggota DPRD dalam berbagai konteks. Studi oleh Nurjihad (2017) menyoroti efektivitas hasil reses anggota DPRD dalam perumusan kebijakan di kabupaten gowa, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspirasi atau keluhan masyarakat yang tertuang dalam hasil reses DPRD yang sudah di paripurnakan belum digunakan secara efektif dalam perumusan kebijakan di kabupaten Gowa. Selain itu Dian Novita, Zanuri (2020) membahas tentang, Efektifitas Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Terkait Serap Aspirasi (Reses) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Sumenep, Hasil dari penelitian ini mengatakan Fungsi dan kewenangan dari badan legislasi merupakan bagian dari pelaksanaan dari sebuah negara demokrasi, dimana dalam pelaksanaan pemerintah tetap harus ada pantauan dan keterlibatan dari masyarakat. selain itu, reses dan partisipasi juga merupakan sesuatu yang menjadi syarat materiil dalam proses pembentukan perda.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Lakudo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan reses, serta mengevaluasi sejauh mana reses mampu menjadi sarana yang efektif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan publik di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki strategi pelaksanaan reses, sehingga lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan transparan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif. Oleh karena itu penelitian kualitatif juga mampu memberikan kesempatan ekspresi dan penjelasan yang lebih besar (horison, 2009). peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang mana

dalam metode ini bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah. Lokasi ini dipilih berdasarkan tingginya variasi dalam praktik politik lokal dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Subjek penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan kriteria partisipan meliputi anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan reses. Sebanyak 15 partisipan dilibatkan dalam penelitian ini, yang terdiri dari 5 anggota DPRD, 5 tokoh masyarakat, dan 5 warga lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan anggota DPRD dan masyarakat setempat untuk menggali pandangan mereka terkait pelaksanaan reses. Wawancara berlangsung selama 45–60 menit dengan panduan semi-terstruktur, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam mengembangkan topik yang muncul selama wawancara. Observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan reses untuk mengamati langsung interaksi antara anggota DPRD dan masyarakat. Dokumentasi yang dianalisis meliputi catatan hasil reses, laporan DPRD, dan artikel media lokal terkait kegiatan reses. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan melakukan coding terhadap hasil wawancara dan observasi. Proses analisis melibatkan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti partisipasi masyarakat, kendala dalam pelaksanaan reses, dan dampak kebijakan yang dihasilkan. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan validitas temuan penelitian (Miles & Huberman, 1994). Validitas dan reliabilitas data dijaga dengan melakukan member-checking kepada para informan untuk memastikan interpretasi data yang akurat. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh (Bilu & Tunda, 2023. Husain et al,2020; Suaib et al., 2023; Harjudin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pelaksanaan reses oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan Lakudo. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi, ditemukan beberapa temuan utama terkait partisipasi masyarakat, kendala pelaksanaan, serta dampak kegiatan reses terhadap kebijakan publik di daerah tersebut.

Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan Lakudo

Ketepatan Penentuan Waktu

Waktu merupakan suatu hal yang sangat penting, dan tidak akan bisa datang kembali, waktu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan dari suatu organisasi. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan waktu dengan semaksimal mungkin agar tercapai efektifitas. (Makmur 2010:7).

Berdasarkan wawancara bersama bapak Suharman S.Pd, M.Si Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Ya, ada target waktu yang kami tetapkan untuk pelaksanaan masa reses. Biasanya, kegiatan reses dilakukan selama dua minggu penuh. Kami berusaha untuk memastikan bahwa selama masa reses, setidaknya setiap anggota DPRD meluangkan waktu minimal satu minggu untuk menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya. Sejauh ini, kami biasanya dapat mencapai target waktu yang telah ditetapkan. Namun, terkadang ada kendala atau perubahan jadwal yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi pelaksanaan reses. Meskipun waktu yang tersedia cukup, terkadang masih ada keinginan untuk memperpanjang waktu reses agar bisa lebih mendalam mendengarkan aspirasi masyarakat” (5 Januari 2024)

Analisis hasil wawancara dengan Bapak Suharman S.Pd, M. menunjukkan kesadaran DPRD akan pentingnya masa reses dalam menjaring aspirasi masyarakat. Mereka menetapkan target dua minggu penuh untuk reses, dengan harapan setiap anggota DPRD meluangkan minimal satu minggu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Meskipun biasanya target waktu tercapai, terkadang terjadi kendala atau perubahan jadwal yang tidak terduga yang mempengaruhi pelaksanaan reses.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Syarifuddin Re'eno, S.H selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

"Tentu, kami memiliki jadwal yang telah kami atur untuk pelaksanaan masa reses. Umumnya, reses berlangsung selama dua minggu penuh. Kami berupaya agar setiap anggota DPRD dapat meluangkan waktu minimal satu minggu selama masa reses untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di daerahnya. Sampai saat ini, kami biasanya dapat memenuhi target waktu yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, terkadang ada kendala atau perubahan jadwal yang tak terduga yang dapat memengaruhi pelaksanaan reses. Meskipun waktu yang tersedia sudah cukup, terkadang kami juga merasa perlu memperpanjang masa reses untuk dapat lebih mendalam dalam mendengarkan aspirasi masyarakat." (5 Januari 2024)

Analisis singkat dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anggota DPRD mengakui pentingnya reses sebagai waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Mereka memiliki jadwal yang terjadwal dengan baik untuk reses, dengan upaya untuk memastikan setiap anggota dapat meluangkan waktu yang cukup untuk berada di daerah pemilihannya. Meskipun demikian, mereka juga mengakui bahwa terdapat kendala atau perubahan jadwal yang tak terduga yang dapat memengaruhi pelaksanaan reses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, terutama anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah dan tokoh masyarakat setempat, dapat diambil beberapa kesimpulan yang relevan terkait dengan pelaksanaan masa reses di wilayah tersebut. terdapat konsistensi dalam penetapan waktu pelaksanaan masa reses di Kabupaten Buton Tengah, yaitu selama dua minggu penuh setiap periode reses.

Anggota DPRD berkomitmen untuk meluangkan waktu minimal satu minggu selama masa reses untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat guna mendengarkan aspirasi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah mereka.

Kendati terdapat perubahan jadwal yang tak terduga atau kendala lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan reses, upaya untuk mencapai target waktu yang telah ditetapkan biasanya dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Gambar 1



Sumber : Sekertariat DPRD Kabupaten Buton Tengah

Dalam keseluruhan, wawancara dengan berbagai pihak terkait menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dan kendala dalam pelaksanaan masa reses, upaya untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan tetap menjadi fokus utama. Diperlukan kolaborasi yang erat antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan masa reses dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi pijakan utama dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan bersama.

Ketepatan Perhitungan Biaya

Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan, biaya juga sangat mempengaruhi kelancaran dari kegiatan suatu organisasi, kurangnya jumlah pendanaan atau biaya dapat menghambat kegiatan organisasi, sehingga dapat menimbulkan ketidak efektifan. (Makmur 2010:7).

Biaya Anggaran Perjalanan Dinas untuk kegiatan Reses dan total anggaran yang diterima dari bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp.15.000.000 untuk biaya perjalanan dinas bapak Subhan, S.Pd ke desa Madongka, Desa Wongko Lakudo dan GU Timur kecamatan Lakudo.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Suharman S.Pd, M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Dana yang dikeluarkan selama masa reses bervariasi tergantung pada kegiatan yang dilakukan. Secara umum, kami mengalokasikan dana untuk transportasi, konsumsi, dan logistik lainnya dalam hal ini di lakudo anggaran Perjadin dan kegiatan reses adalah 15 Jt . Anggaran yang tersedia biasanya sudah cukup untuk kegiatan reses. Namun, kami terus berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana agar dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat.”
(5 Januari 2024).

Analisis singkat pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan selama masa reses anggota parlemen bervariasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Fokus utama alokasi dana adalah untuk transportasi, konsumsi, dan logistik lainnya total anggarannya adalah 15 JT. Meskipun anggaran yang tersedia sudah cukup, upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana agar dapat mencakup sebanyak mungkin masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama bapak H. Kaimuddin, S.Hi selaku Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

" Biaya yang dikeluarkan selama masa reses berbeda-beda tergantung pada aktivitas yang dijalankan. Umumnya, kami mengalokasikan dana untuk transportasi, makanan dan minuman, serta kebutuhan logistik lainnya. Biasanya, anggaran yang tersedia sudah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan reses. Namun, kami terus berusaha untuk memaksimalkan penggunaan dana tersebut agar dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat dengan efisien.."
(5 Januari 2024)

Analisis singkat dari pernyataan tersebut adalah bahwa biaya yang dikeluarkan selama masa reses berbeda-beda tergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh anggota legislatif. Secara umum, anggaran dialokasikan untuk transportasi, makanan, minuman, dan kebutuhan logistik lainnya. Meskipun anggaran yang tersedia biasanya mencukupi, upaya terus dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan dana tersebut agar dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat dengan efisien. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya efisiensi pengeluaran anggaran publik dan keinginan untuk memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat dalam setiap kegiatan reses.

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan tokoh-tokoh terkait di Kabupaten Buton Tengah, terutama yang berkaitan dengan alokasi dan penggunaan dana selama masa reses, terdapat variasi dalam pengeluaran dana selama masa reses, tergantung pada jenis kegiatan

yang dilakukan. Anggaran tersebut umumnya dialokasikan untuk transportasi, konsumsi, dan kebutuhan logistik lainnya. Meskipun demikian, anggota DPRD dan pihak terkait terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan dana agar dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat dengan efisien.

Dari sudut pandang tokoh masyarakat, terdapat keinginan untuk melihat peningkatan dalam transparansi terkait alokasi anggaran reses. Meskipun informasi terkait anggaran tidak selalu disampaikan secara terbuka, diharapkan bahwa penggunaan dana tersebut dilakukan dengan efisiensi dan transparansi yang optimal.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kesadaran akan pentingnya penggunaan dana reses secara efisien dan transparan untuk mendukung kegiatan reses yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Buton Tengah. Diperlukan upaya terus-menerus dari pihak terkait untuk meningkatkan transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana reses, serta memastikan bahwa setiap kegiatan reses memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang dilayani.

Ketepatan Dalam Pengukuran Keberhasilan

Ketepatan dalam mengukur keberhasilan mengacu pada sejauh mana parameter yang digunakan untuk menilai prestasi atau hasil suatu tindakan atau proyek mencerminkan dengan tepat pencapaian yang sebenarnya. (Makmur 2010).

Gambar 2 Absensi Jumlah Partisipan Kegiatan Reses

16	Belina	16	Belina
17	Zuhron	17	Belina
18	Nouval	18	Belina
19	Denna	19	Belina
20	Ahmar	20	Belina
21	Wia Asya	21	Belina
22	Mugis	22	Belina
23	Amalia	23	Belina
24	W. Mutha	24	Belina
25	Syawal	25	Belina
26	Harid	26	Belina
27	Diana	27	Belina
28	Juli Andri	28	Belina
29	Agusriah	29	Belina
30	Sulhanah	30	Belina
31	Ali Mardiah	31	Belina
32	Nurman	32	Belina
33	Yusuf	33	Belina
34	Karomahudin	34	Belina
35	Harid	35	Belina
36	Budis	36	Belina
37	D. Wira	37	Belina

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Enal	Anggota DPRD	[Signature]
2	Aswad	Ketua	[Signature]
3	Ali Rizki	Anggota DPRD	[Signature]
4	Adi Satrio	Anggota DPRD	[Signature]
5	Kahar	Anggota DPRD	[Signature]
6	Mahmud T	Anggota DPRD	[Signature]
7	Arifudin	Anggota DPRD	[Signature]
8	A. Adhulu	Anggota DPRD	[Signature]
9	Machlan	Anggota DPRD	[Signature]
10	Asyraf	Anggota DPRD	[Signature]
11	Alimuddin	Anggota DPRD	[Signature]
12	Aswari	Anggota DPRD	[Signature]
13	Yusuf	Anggota DPRD	[Signature]
14	Budi	Anggota DPRD	[Signature]
15	Wira	Anggota DPRD	[Signature]

Sumber : Sekertariat DPRD Buton Tengah

Berdasarkan wawancara bersama bapak Tasman, S.E selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Tentu, dalam pelaksanaan kegiatan reses, kami menetapkan beberapa indikator kinerja yang menjadi target, seperti jumlah pertemuan dengan masyarakat, volume aspirasi yang berhasil terhimpun, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang kami berikan. Kami berupaya untuk mengukur bukan hanya jumlah aspirasi yang terkumpul, namun juga fokus pada kualitas dari aspirasi tersebut dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meresponsnya. Evaluasi keberhasilan aspirasi masyarakat kami lakukan berdasarkan seberapa banyak dari mereka yang berhasil diidentifikasi, direspon, dan diimplementasikan dalam kebijakan atau program pembangunan.” (5 Januari 2024)

Analisis singkat daripernyataan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat terhadap partisipasi masyarakat, pemantauan kualitas aspirasi, dan respons yang tepat terhadap kebutuhan yang diungkapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh terkait pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah, dapat disimpulkan bahwa terdapat konsistensi dalam penetapan indikator kinerja dan target yang dijadikan acuan dalam kegiatan reses. Para anggota DPRD menetapkan beberapa indikator kinerja yang mencakup jumlah pertemuan dengan masyarakat, volume aspirasi yang terhimpun, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Meskipun tidak ada target waktu yang spesifik untuk menjangkau aspirasi masyarakat, mereka berupaya memanfaatkan seluruh waktu reses untuk berinteraksi dengan masyarakat partisipasi masyarakat yang hadir cukup memuaskan kurang lebih 40 orang yang diantaranya kepala desa tokoh masyarakat dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah cukup terarah dan memiliki tujuan yang jelas dalam menjangkau aspirasi masyarakat serta meresponsnya dengan langkah-langkah konkret. Meskipun masih ada beberapa tantangan dan variasi pendekatan antara tokoh yang diwawancarai, namun secara keseluruhan, pelaksanaan reses ini terbilang efektif dalam menyediakan forum untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat.

Tabel 3. Usulan masyarakat periode Januari - September 2022

Masa Sidang I	Masa Sidang II	Masa Sidang III
<p>Masa sidang I bulan Okt. – Januari 2021/2022 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penimbunan sarana Olahraga • Pemagaran TPU • Pengadaan mesin pemotong rumput • Pemabangunan ganda pos kamling sekaligus posyandu • Pembangunan aula pertemuan • Pengaspalan jalan tani • Bantuan anggaran untuk Masjid At-Taqwa • Pengaspalan jalan wakainande • Pembuatan rumah adat 	<p>Masa sidang II bulan Februari. – Mei 2022, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan aula kelurahan • Pembukaan jalan baru bolimohangi • Pengadaan rumah adat • Penambahan tinggi talud • Rehabilitasi pagar TPU • Jaring untuk para Nelayan (2 inc) • Pengaspalan jalan usaha tani kaone one • Pengadaan pagar seragam • Pengadaan bangunan postum 	<p>Masa sidang III bulan Juni. – September 2022, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan puskesmas pembantu • Pembuatan kartu nelayan • Pagar seragam pemukiman • Pengadaan cool box • Pembangunan jalan masuk perahu warga • Pembanguna pagar SDN 6 Lakudo • Pengadaan sarana dan prasarana alat tangkap nelayan • Pengadaan modal usaha UMKM • Bedah Rumah

Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pilihan pasti akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan pilihan-pilihan yang tepat agar tercapai efektifitas. (Makmur 2010:7).

Berdasarkan wawancara bersama bapak Suharman S.Pd, M.Si Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Kendala utama adalah terkait dengan jadwal yang padat dan tantangan logistik dalam menjangkau wilayah yang luas di dapil kami. Ya, terkadang kami mengalami penolakan dari sebagian masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, kami terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kami mencoba untuk mendengarkan dengan seksama setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik sesuai dengan kewenangan dan kapasitas kami sebagai anggota DPRD” (5 Januari 2024)

Analisis singkat dari pernyataan dari salah satu anggota DPRD Buton Tengah tersebut menunjukkan bahwa anggota DPRD tersebut menghadapi beberapa kendala utama, di antaranya adalah jadwal yang padat dan tantangan logistik dalam menjangkau wilayah yang luas di daerah pemilihannya. Ini mencerminkan masalah umum yang dihadapi oleh banyak anggota DPRD di berbagai daerah, di mana tugas mereka sering kali memerlukan perjalanan yang intens dan efisiensi waktu yang tinggi.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Syarifuddin Fanta, S. IP Selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Ya, beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan sumber daya seringkali menjadi tantangan selama masa reses. Terkadang, ada penolakan atau ketidakpuasan dari sebagian masyarakat terhadap kebijakan atau kinerja DPRD seperti pada masa rese ini memang ada beberapa kebijakan yang kami tolak dan kami usulkan yang memang paling dibutuhkan masyarakat seperti jalan usaha tani dan jalan dusun serta pengadaan jaring dan pagar pantai. Anggota DPRD berusaha untuk mendengarkan dan menjelaskan kebijakan serta upaya yang telah dilakukan. Anggota DPRD berusaha memberikan solusi atau menjelaskan kebijakan yang diambil kepada masyarakat, serta berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat.” (5 Januari 2024).

Keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi hambatan yang sering dihadapi selama masa reses. Terkadang, waktu yang tersedia dirasa kurang memadai untuk menjangkau aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Namun, anggota DPRD dan tokoh masyarakat tetap berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, meskipun dalam kondisi yang terbatas tersebut.

Dari hasil wawancara ini, dapat dilihat bahwa upaya untuk menjalankan reses dengan efektif memang menghadapi sejumlah hambatan. Namun, kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif masyarakat serta komitmen anggota DPRD dan tokoh masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan mencari solusi yang terbaik merupakan hal yang positif. Dengan demikian, perlu terus dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan masa reses guna memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat benar-benar terwakili dan diperjuangkan di tingkat legislatif.

Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir para wakil rakyat dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat selama reses menunjukkan komitmen mereka terhadap tugas representasi. Ini memperkuat hubungan antara wakil dan konstituen, serta memastikan bahwa proses demokrasi

berjalan dengan baik dan benar-benar melayani kepentingan rakyat. Ketepatan berpikir menjadi landasan bagi keberhasilan reses dalam menjawab dan memenuhi harapan masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Suharman S.Pd, M.Si Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Sebagai anggota DPRD, saya telah aktif mendengarkan berbagai keluhan masyarakat dalam dapil saya. Saya sering mengadakan pertemuan terbuka, menyelenggarakan dialog interaktif, dan menerima langsung keluhan serta aspirasi masyarakat. Selain itu, saya juga memanfaatkan sarana komunikasi seperti surat, telepon, dan media sosial untuk memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat didengar dan direspons dengan tepat. Saya telah melakukan berbagai langkah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang terabaikan. Salah satunya adalah dengan mengadvokasi masalah-masalah tersebut di dalam sidang-sidang DPRD, baik melalui penyampaian pidato maupun dengan menyusun usulan dan proposal untuk dibahas secara lebih mendalam. Ketika ada masyarakat yang merasa bahwa partisipasinya tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, saya berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Selain itu, saya juga berkomunikasi dengan pihak pemerintah terkait untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah” (5 Januari 2024)

Analisis singkat dari pernyataan salah satu anggota DPRD kabupaten buton Tengah tersebut menunjukkan bahwa anggota DPRD tersebut telah aktif dalam mendengarkan dan merespons keluhan serta aspirasi masyarakat dalam dapilnya. Mereka telah menggunakan berbagai metode komunikasi, termasuk pertemuan terbuka, dialog interaktif, surat, telepon, dan media sosial untuk memastikan setiap keluhan didengar dan ditanggapi. Selain itu, mereka juga melakukan langkah konkret untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, seperti mengadvokasi masalah-masalah tersebut di dalam sidang-sidang DPRD dan berkomunikasi dengan pihak terkait dalam pemerintahan.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Syarifuddin Fanta, S.IP Selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Anggota Dewan di dapil 1 secara aktif mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan dan keluhan yang mereka miliki. Mereka juga berinisiatif untuk memfasilitasi dialog antara warga dan pihak terkait guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Setelah mendengar aspirasi masyarakat tersebut, anggota DPRD kemudian menyampaikannya di forum DPRD serta melakukan advokasi agar masalah tersebut mendapatkan perhatian yang layak dari pihak pemerintah daerah. Mereka berupaya untuk menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah daerah, dengan mengajukan keluhan tersebut di dalam sidang DPRD serta meminta tanggapan dan langkah tindak lanjut dari pihak yang berwenang. (5 Januari 2024)

Analisis singkat pernyataan salah satu tokoh masyarakat tersebut menunjukkan bahwa anggota Dewan dari dapil 1 telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap representasi dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengadakan pertemuan, mendengarkan masukan, dan memfasilitasi dialog, mereka memperlihatkan kesediaan untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya. Tindakan ini mencerminkan upaya untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat secara langsung.

Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat selalu didengar dan diwakili di tingkat legislatif serta di tingkat eksekutif. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan reses, namun upaya terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam menyerap aspirasi masyarakat.

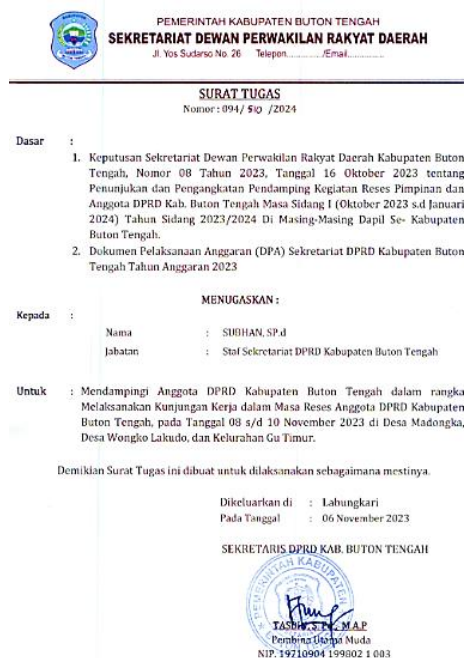
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan publik yang ada. Upaya mereka dalam mendengarkan dan mewakili suara

masyarakat merupakan langkah yang krusial dalam memperkuat proses demokrasi dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Surat tugas bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga simbol kepercayaan dan tanggung jawab. Ketepatan dalam menjalankan perintah yang diberikan melalui surat tugas menjadi indikator penting dalam menilai profesionalisme dan integritas wakil rakyat. Ini memastikan bahwa setiap kegiatan, terutama reses, dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi dan pemerintahan yang lebih baik.

Gambar 3



Sumber: Sekertariat DPRD Buton Tengah

Dari gambar diatas menunjukkan surat tugas untuk melaksanakan reses yang ditugaskan kepada bapak Subhan, S.Pd sebagai staf anggota DPRD Kab. Buton Tengah yang Akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 november 2023.

Laporan pelaksanaan reses merupakan dokumen penting yang merangkum seluruh kegiatan dan hasil yang dicapai selama masa reses. Laporan ini mencakup detail mengenai pertemuan dengan konstituen, aspirasi yang disampaikan, serta tindak lanjut yang direncanakan. Ketepatan dalam melakukan perintah menjadi kunci utama dalam penyusunan laporan ini.

Ketika anggota legislatif melaksanakan reses dengan tepat dan sesuai perintah atau panduan yang telah ditetapkan, hasilnya akan terlihat dalam laporan yang komprehensif dan akurat. Ketepatan dalam mengikuti prosedur, menghadiri semua pertemuan yang dijadwalkan, serta mendokumentasikan setiap sesi dialog dengan masyarakat, memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan realitas di lapangan dan kebutuhan masyarakat dengan jelas.

Dengan demikian, ketepatan dalam melakukan perintah selama pelaksanaan reses tidak hanya memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan lancar, tetapi juga bahwa hasilnya terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan komitmen

wakil rakyat dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan bertanggung jawab, serta memastikan aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara efektif.

Gambar 4



Sumber: Sekretariat DPRD Buton Tengah

Gambar diatas ini menunjukkan lapran kegiatan reses dikecamatan lakudo yang telah dilaksanakan ditanggal 8 sampai dengan 10 november 2023 lalu laporan ini berisikan dasar pelaksanaan kegiatan reses, maksud dan tujuan, waktu dan tempat, hasil kegiatan dan diakhiri dengan penutup.

Keberhasilan aktifitas organisasi juga tidak dapat lepas dari peranan kepemimpinan. Dimana pemimpin tersebut memberikan perintah harus jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat dilakukan dengan mudah. (Makmur 2010:7).

Berdasarkan wawancara bersama bapak Tasman, S.E selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Ya, kegiatan reses yang saya lakukan selalu sesuai dengan aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Buton Tengah. Selama masa reses, saya melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan pertemuan terbuka dengan masyarakat, melakukan kunjungan ke berbagai lokasi di dapil saya, mengadakan dialog interaktif, serta mengumpulkan masukan dan aspirasi dari masyarakat. Selama proses reses, saya secara aktif melakukan upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertemuan terbuka yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, hingga warga biasa. Selain itu, saya juga menyediakan sarana komunikasi seperti kotak saran dan formulir masukan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.” (wawancara 5 Januari).

Analisis singkat dari pernyataan tersebut adalah bahwa kegiatan reses anggota DPRD telah mengikuti peraturan yang berlaku dengan melakukan pertemuan terbuka dan kunjungan lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Mereka terlibat dalam dialog interaktif, kunjungan ke lokasi strategis, dan berbagai aktivitas lainnya untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui upaya-upaya ini, mereka berusaha secara aktif mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui pertemuan terbuka, diskusi kelompok, dan penyediaan formulir atau kotak saran di berbagai lokasi.

Berdasarkan rangkaian wawancara dengan beberapa tokoh terkait, terdapat gambaran yang cukup menyeluruh mengenai pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah. Dari pernyataan Ketua Komisi 3 DPRD, bapak Tasman, S.E, Ketua Bapemperda DPRD, bapak Syarifuddin Re’eno, S.H, serta Anggota DPRD, bapak Adnan, S.H, terungkap bahwa kegiatan reses yang dilakukan selalu mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga aturan tersebut berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Buton

tenaga Nomor 82 Tahun 2023 dan DPA Sekretariat DPRD . Berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari pertemuan terbuka dengan masyarakat, kunjungan lapangan, dialog interaktif, hingga pengumpulan masukan dan aspirasi dari masyarakat.

Dari sisi partisipasi anggota DPRD, terlihat upaya aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui berbagai cara, seperti pertemuan terbuka yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi seperti kotak saran dan formulir masukan, serta interaksi langsung dengan warga di berbagai tempat di dapil masing-masing. Hal ini mencerminkan keseriusan dan komitmen anggota DPRD dalam mewujudkan representasi yang baik terhadap aspirasi masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah terlihat cukup komprehensif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam mengoptimalkan waktu yang tersedia dan meningkatkan partisipasi serta representasi masyarakat dari berbagai lapisan dalam setiap kegiatan reses. Dengan demikian, upaya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan reses perlu terus dilakukan guna memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat benar-benar terwakili dan diperjuangkan di tingkat legislatif.

Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Tujuan yang ditetapkan dengan jelas akan mendukung kegiatan organisasi untuk mencapai efektifitas, karena dengan tujuan yang jelas, maka proses pencapaian tujuan akan terarah dan dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan tujuan yang hendak di capai. (Makmur 2010:7).

Berdasarkan wawancara bersama bapak Suharman S.Pd, M.Si Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Ya, dalam setiap pelaksanaan reses, saya selalu memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan utama dari kegiatan reses ini adalah untuk mendengarkan langsung aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat di dapil saya, serta untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja DPRD dan pemerintah kepada masyarakat. Ya, semua aktivitas yang dilakukan selama reses selalu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Saya selalu berusaha untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang maksimal bagi masyarakat di dapil saya” (5 Januari 2024).

Berdasarkan rangkaian wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah dan tokoh masyarakat, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan efektivitas pelaksanaan masa reses di wilayah tersebut. Tujuan yang jelas dan terukur merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan reses. Para anggota DPRD dan tokoh masyarakat secara konsisten menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam setiap kegiatan reses. Tujuan utama reses adalah untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat, serta menyampaikan informasi mengenai kinerja DPRD dan pemerintah kepada mereka. Meskipun ada variasi dalam penjelasan, namun fokus pada mendengarkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tetap menjadi prioritas.

Pelaksanaan kegiatan selama reses cenderung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Para anggota DPRD dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa mereka berupaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan reses memberikan manfaat dan kontribusi maksimal bagi masyarakat. Namun, ada penekanan bahwa terkadang kegiatan tersebut kurang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga perlu perhatian lebih dalam perencanaan agenda reses berikutnya.

Keterlibatan masyarakat dalam reses dianggap cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses memberikan indikasi adanya sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung efektivitas reses. Namun, perlu diingat

bahwa representasi masyarakat dari berbagai lapisan dan kelompok masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Terdapat kesadaran akan pentingnya hubungan yang kuat antara anggota legislatif dan masyarakat untuk mendukung efektivitas reses. Meskipun dalam wawancara tidak secara eksplisit disebutkan, namun penekanan pada interaksi langsung antara anggota DPRD dan masyarakat menunjukkan bahwa hubungan yang baik menjadi landasan bagi pelaksanaan reses yang efektif.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, namun secara umum, pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan Lakudo telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat. Langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari kegiatan reses bagi masyarakat.

Ketepatan Sasaran

Terdapat sasaran yang sifatnya untuk jangka pendek maupun jangka panjang, pemilihan sasaran dalam jangka waktu yang tepat akan mendukung teriptanya suatu efektifitas. (Makmur 2010:7).

Berdasarkan wawancara bersama bapak Suharman S.Pd, M.Si Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Ya, selama kegiatan reses, kami selalu memiliki sasaran yaitu masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan tugas kami mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dan aspirasi dari masyarakat, menjalin komunikasi yang lebih baik dengan konstituen, serta memperjuangkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di dapil saya. Meskipun belum semua sasaran tercapai secara sempurna, namun saya terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan hasil dari setiap kegiatan reses yang saya lakukan” (5 Januari 2024).

Analisis wawancara ini ada kesadaran yang tinggi di antara anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah mengenai pentingnya mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Komitmen untuk memperbaiki komunikasi dengan konstituen dan fokus pada daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh pemerintah menunjukkan upaya yang serius untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan perhatian yang layak. Meskipun tantangan masih ada, seperti belum tercapainya semua sasaran secara sempurna, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan hasil dari kegiatan reses merupakan langkah positif dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Syarifuddin Fanta, S.IP Selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Sasaran dari kegiatan reses ini adalah untuk mencapai sebanyak mungkin segmen masyarakat di Kecamatan Lakudo dan memastikan bahwa representasi mereka dianggap penting oleh anggota DPRD. Secara keseluruhan, pencapaian sasaran ini dinilai memuaskan selama pelaksanaan reses. Namun, masih ada sejumlah kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat dan memerlukan perhatian tambahan. (5 Januari 2024)

Analisis wawancara ini kegiatan reses di Kecamatan Lakudo telah berjalan dengan baik dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat dan mendengar aspirasi mereka. Komitmen anggota DPRD untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan terbukti nyata. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlibat sepenuhnya. Untuk ke depan, diperlukan upaya lebih lanjut dan strategi yang lebih inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan reses dan proses demokrasi di Kabupaten Buton Tengah.

Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reses di Kecamatan Lakudo cukup efektif dalam menjaring aspirasi masyarakat, tetapi masih ada tantangan

signifikan yang perlu diatasi. Keterbatasan waktu, akses informasi yang tidak merata, serta kendala logistik menjadi penghambat utama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan reses.

Partisipasi masyarakat yang rendah, terutama dari kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan komunikasi mengenai jadwal serta manfaat kegiatan reses. Upaya untuk melibatkan semua lapisan masyarakat secara lebih aktif dapat dilakukan dengan memperbaiki distribusi informasi, baik melalui media lokal maupun tokoh masyarakat.

Selain itu, kendala terkait keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pasca-reses. Meski aspirasi telah diserap dengan baik, tantangan dalam alokasi anggaran menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran dan memadai guna merealisasikan aspirasi masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan reses memiliki potensi besar untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, tetapi diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam aspek distribusi informasi, perencanaan logistik, serta alokasi anggaran agar reses dapat berjalan lebih efektif dan merata.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan Lakudo

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merujuk pada aspek-aspek manusia yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, ini mencakup semua individu yang bekerja dalam organisasi tersebut. sumber daya manusia meliputi segala hal terkait dengan tenaga kerja, seperti keterampilan, pengetahuan, pengalaman, keahlian, kemampuannya.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Suharman S.Pd, M.Si Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia yang ada saat ini masih memiliki kekurangan dalam mendukung pelaksanaan masa reses secara optimal. Untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, kami terus mendorong pelatihan dan pembinaan bagi staf kantor kami yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan reses.”(5 Januari 2024)

Analisis wawancara ini tantangan terkait sumber daya manusia merupakan salah satu isu utama dalam pelaksanaan reses di Kabupaten Buton Tengah. Meskipun saat ini terdapat kekurangan dalam mendukung kegiatan reses secara optimal, langkah-langkah konkret telah diambil untuk mengatasi masalah ini melalui pelatihan dan pembinaan staf. Komitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Buton Tengah serius dalam upaya mereka untuk memastikan bahwa pelaksanaan reses dapat berjalan dengan lancar dan efektif, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih baik.

Partisipasi SDM yang memiliki keahlian masing-masing bidang sangat penting dalam kegiatan reses ini. Mereka tidak hanya turut serta dalam kegiatan tersebut, tetapi juga memiliki peran yang aktif dalam menampung serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, partisipasi mereka juga mencakup memberikan ide-ide konstruktif untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

Keberhasilan kegiatan reses ini juga mencerminkan komitmen DPRD Kabupaten Buton Tengah dalam mendengarkan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan melibatkan SDM yang memiliki keahlian dan pengalaman di berbagai bidang, reses tersebut menjadi platform yang efektif untuk mengumpulkan masukan, merumuskan solusi, dan mengimplementasikan ide-ide yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan reses DPRD Kabupaten Buton Tengah tidak hanya merupakan rutinitas formal, tetapi juga menjadi wadah yang efektif untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Pentingnya memiliki struktur organisasi yang jelas dan efektif dalam pelaksanaan reses juga ditekankan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merujuk pada kerangka kerja atau tata letak hierarki dan hubungan antara berbagai komponen atau unit dalam suatu organisasi.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Tasman, S.E selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Pembagian tugas dalam organisasi legislatif terkait kegiatan reses sangatlah penting untuk memastikan segala aspek terkait reses berjalan dengan lancar. Kami memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas koordinasi dengan masyarakat, tim teknis yang menangani logistik dan dokumentasi, serta tim advokasi yang fokus pada penyampaian aspirasi masyarakat ke dalam proses legislasi. Selain itu kami juga bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.” (5 Januari 2024).

Analisis ini pembagian tugas yang efektif dalam kegiatan reses DPRD Kabupaten Buton Tengah memastikan bahwa semua aspek terkait reses dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Melalui pembentukan tim-tim khusus dengan tanggung jawab masing-masing, DPRD Kabupaten Buton Tengah dapat mengoptimalkan interaksi dengan masyarakat, menangani segala persiapan teknis, memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

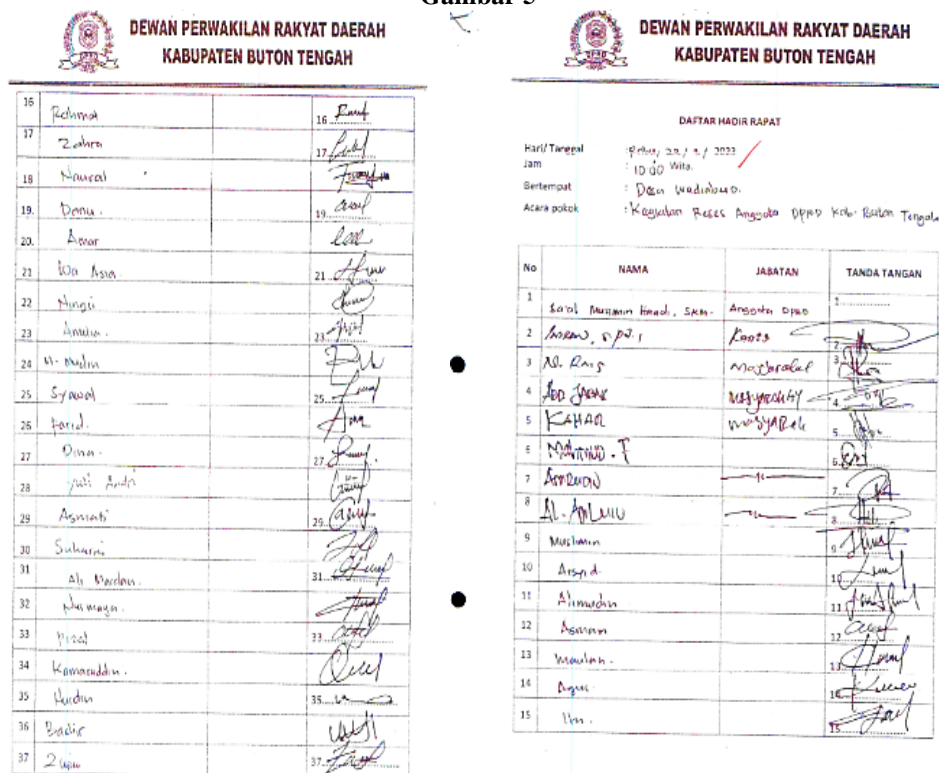
Struktur TIM reses di Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yaitu Anggota DPRD Syafrudin, SH yang didampingi Staf Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah bapak Subhan, S.Pd dan juga Mahasiswa yang melakukan magang di DPRD Kabupaten Buton Tengah. Itulah tim kegiatan reses di kecamatan Lakudo pada tanggal 8 sampai dengan 10 November 2023.

3. Adanya Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat

Dukungan dan partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan dan kontribusi individu-individu atau kelompok dalam suatu komunitas atau masyarakat terhadap berbagai usaha, inisiatif, atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memecahkan masalah, atau mencapai tujuan tertentu.

Absensi dalam kegiatan reses menunjukkan lebih dari sekadar kehadiran fisik; itu mencerminkan juga tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis. Ketika anggota legislatif mengadakan reses, mereka berharap untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya, mendengarkan aspirasi, dan menawarkan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Gambar 5



Sumber : Sekertariat DPRD Buton Tengah

Dari gambar di atas, terlihat bahwa jumlah partisipasi dari absensi sekitar 40 orang yang hadir. Ini menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam kegiatan tersebut, dengan sebagian besar peserta hadir untuk berkontribusi dan terlibat dalam proses yang sedang berlangsung. Meskipun masih ada sedikit yang absen, namun keseluruhan angka absensi relatif rendah, menandakan minat yang kuat dari peserta untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Suharnan S.Pd, M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses sangatlah penting karena itu adalah kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan langsung aspirasi dan kebutuhan mereka. Kami aktif menggalang partisipasi melalui sosialisasi sebelum masa reses, pemanfaatan media sosial, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat. Membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dilakukan melalui komunikasi terbuka, responsif, dan kerja nyata dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.” (5 Januari 2024).

Analisis wawancara ini DPRD Kabupaten Buton Tengah mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan reses dan secara aktif berupaya untuk mendorong partisipasi mereka. Melalui upaya sosialisasi, pemanfaatan media sosial, dan kerjasama dengan

tokoh masyarakat, DPRD berusaha membangun hubungan yang kuat dan responsif dengan masyarakat, sehingga aspirasi mereka dapat diwakili dengan baik dalam proses legislasi.

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses sudah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat guna meningkatkan efektivitas reses dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa reses bukan hanya sekedar rutinitas formal, tetapi merupakan kesempatan berharga untuk memperkuat keterhubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan prinsip demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Sebagian besar warga yang diwawancarai mengungkapkan bahwa aspirasi mereka sudah disampaikan, namun belum ada tindak lanjut yang nyata. Hal ini selaras dengan temuan sebelumnya dari studi Aspinall dan Sukmajati (2015), yang menyatakan bahwa efektivitas partisipasi masyarakat dalam politik lokal sering kali dipengaruhi oleh akses informasi dan persepsi terhadap kemampuan wakil rakyat dalam menindaklanjuti aspirasi.

4. Adanya Sistem Nilai Yang Dianut

Sistem nilai yang dianut merujuk pada sekumpulan keyakinan, prinsip, dan norma-norma yang membentuk pandangan seseorang atau kelompok tentang apa yang dianggap benar, baik, atau penting dalam hidup. Sistem nilai ini mempengaruhi perilaku, keputusan, dan prioritas dalam kehidupan individu atau kelompok.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Suharman S.Pd, M.Si Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa:

"Sistem nilai yang dipegang oleh anggota legislatif menjadi landasan dalam merumuskan prioritas rekomendasi dan solusi selama reses. Kami mengutamakan prinsip keadilan, kepentingan masyarakat luas, dan keberlanjutan pembangunan. Sistem nilai ini memotivasi kami untuk mengambil tindakan konkret setelah reses, seperti mengusulkan kebijakan atau anggaran yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah kami dengar dan sampaikan ke dalam proses legislasi." (5 Januari 2024)

Analisis wawancara sistem nilai yang dipegang oleh anggota legislatif DPRD Kabupaten Buton Tengah tidak hanya menjadi dasar dalam menentukan prioritas selama reses, tetapi juga menjadi motivasi untuk mengambil tindakan konkret yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Komitmen pada prinsip keadilan, kepentingan masyarakat luas, dan kelanjutan pembangunan menegaskan komitmen DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pernyataan yang senada disampaikan oleh berbagai tokoh seperti Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Bapemperda, dan Anggota DPRD, menunjukkan kesepakatan bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi pijakan utama dalam mengarahkan langkah-langkah mereka. Sistem nilai yang berlandaskan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat menjadi motivasi bagi anggota legislatif untuk bertindak lebih proaktif dan responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat selama masa reses.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menegaskan pentingnya sistem nilai yang dipegang oleh anggota legislatif dalam menentukan prioritas rekomendasi dan solusi selama masa reses, dengan fokus utama pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Upaya untuk mengimplementasikan hasil-hasil reses menjadi bagian integral dari tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat, sementara partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas dan kualitas proses tersebut.

KESIMPULAN

pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan Lakudo cukup efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat, meskipun terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Partisipasi masyarakat yang rendah, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, menunjukkan adanya hambatan dalam akses informasi dan distribusi sosialisasi terkait kegiatan reses. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam menjangkau seluruh wilayah pemilihan.

Meskipun demikian, reses memiliki dampak positif dalam perumusan kebijakan publik, terutama dalam hal penyampaian aspirasi terkait infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghalang dalam merealisasikan sebagian besar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan reses di masa mendatang, disarankan agar DPRD dan pihak terkait meningkatkan strategi sosialisasi untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya dari kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Selain itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan waktu dan sumber daya, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa aspirasi yang diserap selama reses dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah.

Dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan kegiatan reses akan semakin efektif dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat, serta memperkuat peran DPRD dalam pengambilan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bilu, L., & Tunda, A. (2023). Dampak kebijakan dalam jaringan terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan dasar pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara. *Journal Publicuho*, 6(2), 693-701.
- Harjudin, L. (2020). Dilema penanganan COVID-19: Antara legitimasi pemerintah dan kepatuhan masyarakat. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 2716(3857).
- Husain, M. N., Nasir, M., & Anggraini, D. (2020). Analisis evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc pemilihan umum 2019 di Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 3(1), 131.
- Makmur. (2010). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Refika Aditama.
- Novita, D., & Zainuri, D. (2020). Efektivitas peraturan DPRD tentang tata tertib terkait serap aspirasi (reses) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumenep. Universitas Wiraraja.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Nurjihad. (2017). Efektivitas hasil reses anggota DPRD dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 45-58.
- Suaib, E., La Ode Mustafa, R., & Iskandar, N. (2023). Analisis kebijakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada Pilkada serentak tahun 2020. *Journal Publicuho*, 6(1), 1-12.
- Zuhri. (2012). Buku panduan reses. Pangkal Pinang.